**B A B I**

**PENDAHULUAN**

* 1. **Latar Belakang**

Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pemerintah Pusat dan Daerah diwajibkan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai rencana kerja satuan.

Sebagai tindak lanjutnya, Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Renstra Perangkat Daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada RPJMD dan juga diwajibkan menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) dengan berpedoman pada Renstra dan mengacu pada hasil musrenbang.

Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan tahun SKPD yang memuat program dan kegiatan – kegiatan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dalam kurun waktu satu tahun berjalan. Didalam Renja juga memuat permasalahan – permasalahan yang belum dapat diselesaikan pada tahun sebelumnya untuk dapat lebih baik ditahun selanjutnya.

Dengan adanya Renja Perangkat Daerah akan dapat lebih menjamin konsistensi perencanaan dan juga sebagai pedoman pelaksanaan program pembangunan secara berkesinambungan dan sinergi dengan program – program perangkat daerah lainnya .

Rencana Kerja perubahan anggaran tahun 2022 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan penjabaran tahun kedua dari Rencana Strategis (Renstra) tahun 2021-2026 selama 5 (lima) tahun. Perubahan Rencana Kerja ini disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan tahun 2020, antisipasi terhadap permasalahan yang akan dihadapi dengan memperhatikan faktor-faktor yang akan mempengaruhi, aspirasi stakeholder dan dinamika perkembangan lingkungan strategis.

Untuk mewujudkan Pemerintahan yang baik, dilaksanakan melalui pengawasan aparatur, penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan, peningkatan kualitas pelayanan serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Proses penyusunan perubahan Renja merupakan penjabaran dari Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2021-2026 dan akan dilaksanakan untuk jangka waktu 1 tahun, pada triwulan ke 4 (empat) yang memuat tentang kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 5 Tahun 2013 dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 10 Tahun 2014 , Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan pemerintah Kabupaten dibidang Kesatuan Bangsa, Kewaspadaan Nasional dan politik, ketahanan seni budaya, sosial kemasyarakatan agama dan ekonomi, merumuskan serta melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penetapan kebijakan operasional dan kebijakan Kabupaten dibidang kesatuan bangsa, kewaspadaan nasional dan politik , ketahanan seni budaya , sosial kemasyarakatan agama dan ekonomi. Adapun fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai berikut :

1. Menyiapkan rencana strategis dan akuntabilitas kinerja badan ;
2. Melaksanakan semua program dan kegiatan badan sesuai lingkup tugas ;
3. Merumuskan kebijakan dan petunjuk teknis lingkup tugas ;
4. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan badan; dan
5. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan atasan, berkoordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaannya .

Sejalan dengan visi Kabupaten Tanjung Jabung Barat “ Menuju Kabupaten Tanjung Jabung Barat Berkah ( Berkualitas, Ekonomi Maju, Religius, Kompetitif , aman dan harmonis ) “diperlukan pencapaian misi sebagai berikut :

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Beriman, Berilmu dan Berakhlak;
2. Cipta kondisi sosial yang tentram, tertib dan harmonis ;
3. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik ;
4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik ;
5. Peningkatan aktivitas perekonomian daerah dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan ;
6. Pemerataan Pembangunan Daerah dari desa sampai ke kota .

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 ini disusun untuk membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan misi guna mencapai visi yang telah ditetapkan .

* 1. **Landasan Hukum**

Adapun yang menjadi Landasan Hukum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kapaten Tanjung Jabung Barat dalam menyusun Rencana Kerja Perubahan Tahun 2022 ( Renja-P 2022 ) adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai daerah otonom;
8. PeraturanPemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembangunan Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kab/Kota;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentan Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat

**1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud dan tujuan disusunnya Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 adalah :

1. Merupakan dokumen perencanaan penyelenggaraan pemerintahan dalam Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai penjabaran dari Renstra tahun 2021-2026 ;
2. Tersedianya program dan kegiatan – kegiatan yang tersusun secara prioritas yang dapat dijadikan pedoman untuk mengoptimalkan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat ;
3. Menjamin tercapainya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi pelaksanaan program dalam rangka mendukung program pemerintah daerah ;
4. Menjamin tercapainya pemanfaatan seluruh sumber daya yang ada secara efektif, efisien dan bekelanjutan.
5. Menjaga kontinuitas kegiatan dan proses pembangunan agar selaras dengan program tahunan daerah ;
6. Mengakomodir perubahan – perubahan yang terjadi pada asumsi makro perekonomian dan keuangan daerah, kebutuhan organisasi, perubahan aspirasi masyarakat serta terdapat perubahan teknis lainnya berupa penambahan, pengurangan dan pergeseran mata anggaran kegiatan.

**1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika Renja-P Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022, Meliputi :

BAB I PENDAHULUAN

* 1. Latar Belakang
  2. Landasan Hukum
  3. Maksud dan Tujuan
  4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat s.d Triwulan II Tahun 2022

BAB III RENCANA PROGRAM KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH

3.1 Tujuan dan Sasaran

3.2 Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022

BAB V PENUTUP

**BAB II**

**EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH**

**SAMPAI DENGAN TRIWULAN II**

**2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sampai dengan Triwulan II Tahun 2022**

Tahun 2022 anggaran kegiatan yang dikelola oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah sebesar Rp. 6.658.237.609 untuk mendanai pelaksanaan 6 (enam) Program yang direncanakan dalam rencana kerja tahun 2022. Dari jumlah dana tersebut realisasi penyerapan anggaran sampai dengan triwulan II adalah sebesar Rp. 1.920.076.890 atau sebesar 28,84% dari target selama satu tahun anggaran, hal ini terjadi disebabkan belum direalisasikannya belanja Hibah yang diberikan kepada Partai Politik dan Forum Kerukunan Umat Beragama .

Diharapkan melalui perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 tujuan dan sasaran dapat tercapai melalui perubahan program, kegiatan serta anggaran .Terkait dengan hal tersebut, perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja.

Sasaran hari hasil yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat selama Triwulan II Tahun 2022 dan perkiraan target sampai dengan akhir Tahun 2022 yang menjadi dasar pertimbangan adanya perubahan rencana kerja dan anggaran .

Berikut Tabel 2.1 atas evaluasi rencana kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut :

Tabel 2.1

Evaluasi Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2022

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | | **Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan** | | | | **Anggaran** | | | | | **Realisasi** | | | | | | **%** | | | | | **Indikator Output** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Tolak Ukur** | | **Target** | | | | | **Realisasi** | | | | | | **%** | | | | | |
|  | | *Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota* | | | | *4.922.586.292* | | | | | *1.764.926.223* | | | | | | *35,85* | | | | |  | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |
|  | | *Perencanaan , Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | | | | *42.725.000* | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |
| 1. | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | 21.850.000 | | | | | 9.830.000 | | | | | | 44,99 | | | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | 5Laporan | | | | | 3 Laporan | | | | | | 60 | | | | | |
| 2. | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | 20.875.000 | | | | | 9.660.000 | | | | | | 46,28 | | | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | 4 Laporan | | | | | 2 Laporan | | | | | | 50 | | | | | |
|  | | *Administrasi Keuangan Perangkat Daerah* | | | | *4.122.447.856* | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |
| 3. | | Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN | | | | 4.019.847.856 | | | | | 1.201.726.640 | | | | | | 29,89 | | | | | Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan Asn | | 30 Orang/bulan | | | | | 30 Orang/ bulan | | | | | | 41,67 | | | | | |
| 4. | | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | | 102.600.000 | | | | | 42.750.000 | | | | | | 41,67 | | | | | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | 12 Dokumen | | | | | 5 Dokumen | | | | | | 41,67 | | | | | |
| **No** | | | | **Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan** | | | | **Anggaran** | | | | **Realisasi** | | | **%** | | | | | **Indikator Output** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Tolak Ukur** | | | | | | **Target** | | | | | | **Realisasi** | | | | | **%** | | | | |
|  | | | | *Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah* | | | | *21.800.000* | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 5. | | | | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | | | | 16.800.000 | | | | 16.800.000 | | | 100 | | | | | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan | | | | | | 42Paket | | | | | | 42 Paket | | | | | 100 | | | | |
| 6. | | | | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan | | | | 5.000.000 | | | | - | | | - | | | | | Jumlah Orang Yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang – undangan | | | | | | 1 Orang | | | | | | - | | | | | - | | | | |
|  | | | | *Administrasi Umum Perangkat Daerah* | | | | *525.962.873* | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 7. | | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor | | | | 3.111.170 | | | | *3*.111.170 | | | 100 | | | | | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan | | | | | | 2 Paket | | | | | | 2 Paket | | | | | 100 | | | | |
| 8. | | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | 36.356.703 | | | | 22.474.160 | | | 61,82 | | | | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan | | | | | | 12 Paket | | | | | | 5 Paket | | | | | 41,67 | | | | |
| 9. | | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | 4.210.000 | | | | 1.750.000 | | | 41,57 | | | | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan | | | | | | 12 Paket | | | | | | 5 Paket | | | | | 41,67 | | | | |
| 10. | | | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | | 10.470.000 | | | | 5.460.000 | | | 52,15 | | | | | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan | | | | | | 6 Paket | | | | | | 3 Paket | | | | | 50.00 | | | | |
| 11. | | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – undangan | | | | 1.440.000 | | | | 600.000 | | | 41,67 | | | | | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Per UU yang disediakan | | | | | | 12 Dokumen | | | | | | 5 Dokumen | | | | | 41,67 | | | | |
| 12. | | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 470.375.000 | | | | 326.842.328 | | | 69.49 | | | | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | 12 Laporan | | | | | | 5 Laporan | | | | | 41,67 | | | | |
| **No** | | | **Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan** | | | | | **Anggaran** | | | | **Realisasi** | | | | **%** | | | | | **Indikator Output** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Tolak Ukur** | | | | | | **Target** | | | | | | **Realisasi** | | | | | **%** | | | | |
|  | | | *Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | | | | | *15.600.000* | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 13. | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | 1.800.000 | | | | 960.000 | | | | 53.33 | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | | | 12 Laporan | | | | | | 5 Laporan | | | | | 41,67 | | | | |
| 14. | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | 13.800.000 | | | | 4.061.760 | | | | 29,43 | | | | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | | | | | | 12 Laporan | | | | | | 5 Laporan | | | | | 41,67 | | | | |
|  | | | *Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |
| 15. | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan | | | | | 159.373.063 | | | | *1*00.730.165 | | | | 63,20 | | | | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya | | | | | | 22 Unit | | | | | | 5 Unit | | | | | 22,73 | | | | |
| 16. | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | | | 9.050.000 | | | | 8.170.000 | | | | 90,28 | | | | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara | | | | | | 13 Unit | | | | | | 13 Unit | | | | | 100 | | | | |
| 17. | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | 25.627.500 | | | | 10.000.000 | | | | 39.02 | | | | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | | | | | | 1 Unit | | | | | | - | | | | | - | | | | |
|  | | | *Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan* | | | | | *144.256.125* | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | *Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan* | | | | | 144.256.125 | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |
| **No** | | | | **Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan** | | | | **Anggaran** | | | | **Realisasi** | | | | | **%** | | | | | **Indikator Output** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Tolak Ukur** | | | | | **Target** | | | | | | **Realisasi** | | | | | **%** | | | | | |
| 18. | | | | Pelaksanaan Koordinasi di bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | | | | 144.256.125 | | | | 31.375.875 | | | | | 21.75 | | | | | Jumlah orang yang mengikuti koordinasi dibidang ideology wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, Bhinneka Tunggal ika, dan sejarah kebangsaan | | | | | 450 orang | | | | | | 200 orang | | | | | 44,44 | | | | | |
|  | | | | *Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik* | | | | *1.134.822.692* | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | |
|  | | | | *Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah , serta Pemantauan Situasi Politik* | | | | *1.134.822.692* | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | |
| 19. | | | | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di daerah | | | | 1.118.572.692 | | | | 29.597.292 | | | | | 2,65 | | | | | Jumlah Orang Yang mengikuti pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum./Pemilukada, serta pemantauan situasi politik di daerah | | | | | 50 orang | | | | | | 50 orang | | | | | 100 | | | | | |
| **No** | | | | **Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan** | | | | **Anggaran** | | | | **Realisasi** | | | | | **%** | | | | | **Indikator Output** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Tolak Ukur** | | | | | | | **Target** | | | | **Realisasi** | | | | | **%** | | | | | |
| 20. | | | | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di daerah | | | | 16.250.000 | | | | 7.000.000 | | | | | 43.08 | | | | | Jumlah laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di daerah | | | | | | | 4 Laporan | | | | 2 Laporan | | | | | 50 | | | | | |
|  | | | | *Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan* | | | | *17.080.000* | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |
|  | | | | *Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi kemasyarakat* | | | | *17.080.000* | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |
| 21. | | | | Pelaksanaan Kebijakan di bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | | | | 17.080.000 | | | | 7.075.000 | | | | | 41.42 | | | | | Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan di bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | | | | | | | 30 Orang | | | | 30 0rang | | | | | 100 | | | | | |
|  | | | | *Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, sosial dan budaya* | | | | *285.010.000* | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |
|  | | | | *Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya* | | | | *285.010.000* | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |
| **No** | | | | **Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan** | | **Anggaran** | | | **Realisasi** | | | | **%** | | | | | **Indikator Output** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Tolak Ukur** | | | | | | **Target** | | | | | | **Realisasi** | | | | | **%** | | | |
| 22. | | | | Pelaksanaan Kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah | | 285.010.000 | | | 19.975.000 | | | | 7.01 | | | | | Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan Kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah | | | | | | 50 orang | | | | | | - | | | | | *-* | | | |
|  | | | | *Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial* | | *154.482.500* | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | |
|  | | | | *Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial* | | *154.482.500* | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | |
| 23. | | | | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing , Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara , Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di daerah | | 44.547.500 | | | 30.967.500 | | | | 69.52 | | | | | Jumlah orang yang mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing , Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara , Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di daerah | | | | | | 30 Orang | | | | | | 30 orang | | | | | 100 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan** | **Anggaran** | **Realisasi** | **%** | **Indikator Output** | | | |
| **Tolak Ukur** | **Target** | **Realisasi** | **%** |
| 24. | Pelaksanaan Monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing , Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara , Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di daerah | 13.050.000 | 5.000.000 | 38,31 | Jumlah laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing , Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara , Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di daerah | 4 Laporan | 2 Laporan | 50 |
| 25. | Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten / Kota | 96.885.000 | 24.160.000 | 24.94 | Jumlah dokumen hasil pelaksanaan forum koordinasi pimpinan daerah kab/kota | 4 Dokumen | 2 Dokumen | 50 |

**BAB III**

**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

**3.1 Tujuan dan Sasaran**

Tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjng Jabung Barat didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra.

Adapun tujuan Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat yaitu :

“ Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat Yang Paham Dalam Pentingnya Memelihara Kesatuan Bangsa dan Demokrasi “.

Sasaran Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah :

“ Meningkatkan Jumlah Masyarakat Yang Faham Terhadap Kesatuan Bangsa dan Demokrasi “.

Indikator Sasaran terdiri dari :

1. Persentase Masyarakat Yang Paham Terhadap Kesatuan Bangsa
2. Persentase Masyarakat Yang Paham Terhadap Demokrasi

**3.2 Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022**

Berdasarkan analisa kebutuhan terhadap target capaian indikator, maka pada dokumen perubahan Renja ini disusun tabel perbandingan dengan memperlihatkan kenaikan target capaian dan pagu indikatif murni Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada saat sebelum perubahan dilaksanakan, dan target capaian indikator serta pagu indikatif setelah perubahan.

Rencana Kerja dan Pendanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.1

Tabel Usulan Rencana Perubahan Rencana Kerja

Tahun 2022

Perangkat Daerah : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Program / Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target | | Anggaran (Rp) | | | Ket |
| Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/ Berkurang |
|  | *Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota* |  |  |  |  | *4.922.586.292* | *5.744.197.462* | *821.611.170* |  |
|  | *Perencanaan , Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* |  |  |  |  | *42.725.000* | *42.725.000* | - | Tetap |
| 1. | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Badan  Kesbang  Pol | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 5 Laporan | 5 Laporan | 21.850.000 | 21.850.000 | - | Tetap |
| 2. | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Badan  Kesbang  Pol | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 4 Laporan | 4 Laporan | 20.875.000 | 20.875.000 | - | Tetap |
|  | *Administrasi Keuangan Perangkat Daerah* |  |  |  |  | *4.122.447.856* | *4.122.447.856* |  |  |
| 3. | Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN | Badan  Kesbang  Pol | Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan Asn | 30 Orang/ bulan | 30 Orang/ bulan | 4.019.847.856 | 4.019.847.856 | - | Tetap |
| 4. | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Badan  Kesbang  Pol | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 102.600.000 | 102.600.000 | - | Tetap |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Program / Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target | | Anggaran (Rp) | | | Ket |
| Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/ Berkurang |
|  | *Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah* |  |  |  |  | *21.800.000* | *30.800.000* | *9.000.000* | *Bertambah* |
| 5. | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Badan  Kesbang  Pol | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan | 42 Paket | 49 Paket | 16.800.000 | 30.800.000 | 14.000.000 | Bertambah |
| 6. | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan | Badan  Kesbang  Pol | Jumlah Orang Yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang – undangan | 1 Orang | 1 Orang | 5.000.000 | -0- | (5.000.000) | Berkurang |
|  | *Administrasi Umum Perangkat Daerah* |  |  |  |  | *525.962.873* | *844.074.043* | *318.111.170* | *Bertambah* |
| 7. | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor | Badan  Kesbang  Pol | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan | 2 Paket | 4 Paket | 3.111.170 | 6.222.340 | 3.111.170 | Bertambah |
| 8. | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Badan  Kesbang  Pol | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan | 12 Paket | 12 Paket | 36.356.703 | 51.356.703 | 15.000.000 | Bertambah |
| 9. | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Badan  Kesbang  Pol | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan | 12 Paket | 12 Paket | 4.210.000 | 4.210.000 | - | Tetap |
| 10. | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Badan  Kesbang  Pol | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan | 6 Paket | 6 Paket | 10.470.000 | 10.470.000 | - | Tetap |
| 11. | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – undangan | Badan  Kesbang  Pol | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Per UU yang disediakan | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 1.440.000 | 1.440.000 | - | Tetap |
| 12. | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Badan  Kesbang  Pol | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | 12 Laporan | 470.375.000 | 770.375.000 | 300.000.000 | Bertambah |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Program / Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target | | Anggaran (Rp) | | | Ket |
| Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah / Berkurang |
|  | *Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah* |  |  |  |  | *-* | *177.000.000* | *177.000.000* | Bertambah |
| 13. | Pengadaan Aset Tetap Lainnya | Badan Kesbang Pol | Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya Yang Disediakan | - | 4 Unit Laptop  4 Unit Printer  1 Unit Scanner  1 Unit Tablet  4 Unit PC | - | 177.000.000 | 177.000.000 | Bertambah |
|  | *Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* |  |  |  |  | *15.600.000* | *15.600.000* | - | *Tetap* |
| 14. | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Badan Kesbang Pol | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Laporan | 12 Laporan | 1.800.000 | 1.800.000 | - | Tetap |
| 15. | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Badan Kesbang Pol | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | 12 Laporan | 12 Laporan | 13.800.000 | 13.800.000 | - | Tetap |
|  | *Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* |  |  |  |  | *194.050.563* | *511.550.563* | *317.500.000* | *Bertambah* |
| 16. | Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan | Badan Kesbang Pol | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya | 22 Unit | 22 Unit | 159.373.063 | 226.873.063 | 67.500.000 | Bertambah |
| 17. | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Badan Kesbang Pol | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara | 13 Unit | 13 Unit | 9.050.000 | 9.050.000 | - | Tetap |
| 18. | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Badan Kesbang Pol | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | 1 Unit | 1 Unit | 25.627.500 | 275.627.500 | 250.000.000 | *Bertambah* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Program / Kegiatan | Lokasi | | Indikator Kinerja | | Target | | | | Anggaran (Rp) | | | | | | Ket | |
| Sebelum Perubahan | | Setelah Perubahan | | Sebelum Perubahan | | Setelah Perubahan | | Bertambah/ Berkurang | |
|  | *Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan* |  | |  | |  | |  | | *144.256.125* | | *344.256.125* | | *200.000.000* | | *Bertambah* | |
|  | *Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan* |  | |  | |  | |  | | 144.256.125 | | *344.256.125* | | *200.000.000* | | *Bertambah* | |
| 19. | Pelaksanaan Koordinasi di bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | Badan Kesbang Pol | | Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan dibidang ideology wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, Bhinneka Tunggal ika, dan sejarah kebangsaan | | - | | 100 Orang | | - | | 175.000.000 | | 175.000.000 | | Bertambah | |
| 20. | Pelaksanaan Koordinasi di bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | Badan Kesbang Pol | | Jumlah orang yang mengikuti koordinasi dibidang ideology wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, Bhinneka Tunggal ika, dan sejarah kebangsaan | | 450 orang | | 500 orang | | 144.256.125 | | 169.256.125 | | 25.000.000 | | Bertambah | |
|  | *Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik* |  | |  | |  | |  | | *1.134.822.692* | | *1.199.122.692* | | *64.300.000* | | *Bertambah* | |
|  | *Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah , serta Pemantauan Situasi Politik* |  | |  | |  | |  | | *1.134.822.692* | | *1.199.122.692* | | 64.300.000 | | Bertambah | |
| No | Program / Kegiatan | | Lokasi | | Indikator Kinerja | Target | | | Anggaran (Rp) | | | | | | Ket | |
| Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | | Sebelum Perubahan | | Setelah Perubahan | | Bertambah / Berkurang | |
| 21. | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di daerah | | Badan Kesbang Pol | | Jumlah Orang Yang mengikuti pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum./Pemilukada, serta pemantauan situasi politik di daerah | 50 orang | 100 Orang | | 1.118.572.692 | | 1.180.372.692 | | 61.800.000 | | Bertambah | |
| 22. | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di daerah | | Badan Kesbang Pol | | Jumlah laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di daerah | 4 Laporan | 4 Laporan | | 16.250.000 | | 18.750.000 | | 2.500.000 | | Bertambah | |
|  | *Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan* | |  | |  |  |  | | *17.080.000* | | *17.080.000* | | - | | *Tetap* | |
|  | *Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi kemasyarakat* | |  | |  |  |  | | *17.080.000* | | *17.080.000* | | - | | *Tetap* | |
| 23 | Pelaksanaan Kebijakan di bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | | Badan Kesbang Pol | | Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan di bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | 30 Orang | 30 Orang | | 17.080.000 | | 17.080.000 | | - | | Tetap | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Program / Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target | | Anggaran (Rp) | | | Ket |
| Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah/ berkurang |
|  | *Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, sosial dan budaya* |  |  |  |  | *285.010.000* | 285.010.000 | **-** | *Tetap* |
|  | *Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya* |  |  |  |  | *285.010.000* | 285.010.000 | **-** | *Tetap* |
| 24 | Pelaksanaan Kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah | Badan Kesbang Pol | Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan Kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah | 50 orang | 50 orang | 285.010.000 | 285.010.000 | 285.010.000 | Bertambah |
|  | *Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial* |  |  |  |  | *154.482.500* | *306.482.500* | *152.000.000* | *Bertambah* |
|  | *Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial* |  |  |  |  | *154.482.500* | 306.482.500 | *152.000.000* | *Bertambah* |
| 25 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing , Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara , Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di daerah | Badan Kesbang Pol | Jumlah orang yang mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing , Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara , Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di daerah | 30 Orang | 155 Orang | 44.547.500 | 169.547.500 | 125.000.000 | Bertambah |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Program / Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target | | Anggaran (Rp) | | | Ket |
| Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan | Bertambah / berkurang |
| 26 | Pelaksanaan Monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing , Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara , Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di daerah | Badan Kesbang Pol | Jumlah laporan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing , Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara , Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di daerah | 4 Laporan | 4 Laporan | 13.050.000 | 15.050. 000 | 2.000. 000 | Bertambah |
| 27 | Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten / Kota | Badan Kesbang Pol | Jumlah dokumen hasil pelaksanaan forum koordinasi pimpinan daerah kab/kota | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 96.885.000 | 121.885.000 | 25.000.000 | Tetap |
|  | JUMLAH | | | | | *6.658.237.609* | 7.796.148.779 | 1.237.911.170 | *Bertambah* |

**BAB V**

**P E N U T U P**

Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan yang penting dipedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan Semester II tahun 2022 di lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang ditargetkan untuk mewujudkan visi pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat .

Dalam upaya mencapai target kinerja tahun 2022 , seluruh perubahan yang terjadi dalam program / kegiatan tahun 2022 telah mempertimbangkan kemampuan realisasi pelaksanaannya hingga akhir tahun 2022. Dengan demikian diharapkan seluruh unsur di lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat mempedomani isi dokumen Perubahan Renja SKPD Tahun 2022 ini dengan sebaik-baiknya.

Kuala Tungkal, Juni 2022

Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kabupaten Tanjung Jabung Barat

**EFRIZAL, SP**

Pembina

Nip. 19781013 200804 1001